

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan manusia merujuk pada suatu proses yang bertujuan untuk memperluas spektrum pilihan yang tersedia bagi individu. Aspek pilihan yang esensial dalam konteks ini mencakup aspek kesehatan jangka panjang, keberlanjutan fisik, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang esensial untuk memastikan tingkat kehidupan yang layak (BPS Kabupaten Brebes, 2018). Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur melalui kemampuan masyarakat untuk menikmati hasil konkret dari upaya pembangunan, seperti pelayanan pendidikan, layanan kesehatan, dan peluang ekonomi yang memungkinkan hidup layak. Dalam konteks ini, pencapaian pembangunan manusia yang berhasil turut berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Nashshar, 2022).

Secara prinsip, tujuan mendasar dari inisiatif pembangunan ini adalah untuk memperbanyak opsi yang tersedia bagi penduduk, di mana opsi tersebut bersifat tidak terbatas dan dapat berubah seiring waktu. Dengan demikian, penduduk dapat memperoleh akses yang lebih besar terhadap pengetahuan dan pendidikan, nutrisi yang memadai, serta pelayanan kesehatan yang lebih baik, selain juga mencakup peluang mata pencaharian yang aman, dan lain sebagainya. Aspek-aspek pembangunan manusia dengan tegas menekankan pencapaian sasaran khusus, seperti hidup sehat dan memiliki umur panjang, mendapatkan pendidikan, dan dapat menikmati standar kehidupan yang layak. Dengan demikian, esensi pembangunan manusia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas individu dan komunitas. Oleh karena itu, manusia menjadi fokus sentral dalam dinamika proses pembangunan ini (Ismail, 2021).

Salah satu tantangan yang seringkali merintangangi pertumbuhan ekonomi sebuah negara adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diartikan sebagai perluasan opsi yang dapat diakses oleh individu, seiring dengan peluang yang diberikan untuk menjalani kehidupan secara optimal (Maulana, 2022).

United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan IPM pada tahun 1990, yang secara rutin disajikan melalui laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM memiliki utilitas dalam mengukur keberhasilan usaha meningkatkan kualitas hidup manusia, menilai peringkat atau tingkat perkembangan suatu daerah atau negara, berfungsi sebagai indikator kinerja pemerintah, dan menjadi salah satu faktor determinan dalam alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). IPM terbentuk melalui tiga dimensi pokok, yakni umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, serta standar hidup yang layak (BPS Indonesia, 2023a).

Prestasi indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada tahun 2021 mencapai klasifikasi High Human Development (HDI) dengan skor sebesar 0,705, menempatkannya pada peringkat keempat di antara negara-negara ASEAN. Indonesia menempati posisi di bawah Brunei (0,941), Malaysia (0,803), dan Thailand (0,800), yang termasuk dalam kategori Very High Human Development. Sementara itu, negara-negara ASEAN yang memiliki nilai IPM lebih rendah daripada Indonesia meliputi Filipina (0,699), Kamboja (0,593), Myanmar (0,585), dan Laos (0,607), yang masuk dalam kategori Medium High Development. (Supianto, 2022).

Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 72,91, mengalami peningkatan sebesar 0,62 poin atau 0,86 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan skor 72,29. Peningkatan tersebut mencakup seluruh dimensi IPM, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (BPS Indonesia, 2022a). Pertumbuhan IPM pada tahun 2022 menunjukkan percepatan dibandingkan tahun sebelumnya, dan setiap dimensi yang membentuk IPM mengalami peningkatan, terutama pada aspek umur panjang dan hidup sehat serta standar hidup layak. Dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2022 dapat mengharapkan hidup hingga usia 71,85 tahun, mengalami kenaikan sebesar 0,28 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Pada dimensi pengetahuan, harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun meningkat sebanyak 0,02 tahun dari 13,08 menjadi 13,10 tahun, sementara rata-rata lama sekolah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas

mengalami peningkatan sebanyak 0,15 tahun, dari 8,54 tahun menjadi 8,69 tahun pada tahun 2022. Sementara itu, dimensi standar hidup layak yang diukur melalui rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) menunjukkan peningkatan sebesar 323 ribu rupiah atau 2,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya (BPS Indonesia, 2022b).

Data yang merinci skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di 10 provinsi Indonesia pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa DKI Jakarta menduduki peringkat pertama dengan skor IPM sebesar 81,65. Sementara itu, DI Yogyakarta mencapai skor 80,64, Kalimantan Timur mencatatkan skor 77,44, Kepulauan Riau memiliki skor 76,46, Bali mencapai skor 76,44, Sulawesi Utara memiliki skor 73,81, Riau mencatatkan skor 73,52, Banten memiliki skor 73,32, Sumatra Barat mencapai skor 73,26, dan Jawa Barat mencatatkan skor 73,12 (Naurah, 2023).

Pada tahun 2022, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah mencapai 72,79, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang sebesar 72,16. Peningkatan ini terjadi dalam semua komponen, melibatkan kualitas kesehatan, pendidikan, serta pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (BPS Jawa Tengah, 2022). Dari perspektif regional, Pemerintah Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, menjadikan pendidikan dan pembangunan manusia sebagai fokus utama pembangunan. Meskipun demikian, Provinsi Jawa Tengah masih dihadapkan pada disparitas pencapaian IPM antar kabupaten/kota. Disparitas dalam indeks pembangunan manusia ini mencerminkan ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat di antara kabupaten/kota di Jawa Tengah (Alayda, 2022).

IPM Kabupaten Brebes pada tahun 2022 tercatat sebesar 67,03, menempatkannya sebagai IPM terendah ke-35 di Provinsi Jawa Tengah. Sebaliknya, Kota Salatiga mencapai IPM tertinggi dengan skor 84,35 (BPS Jawa Tengah, 2022). Salah satu faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya IPM Kabupaten Brebes adalah tingkat pendidikan yang rendah (Jatengprov, 2023). Beberapa indikator pendidikan yang tidak mencapai target di Kabupaten Brebes meliputi harapan lama sekolah. Pada tahun 2020,

target 12,07 tahun hanya dapat dicapai sebanyak 12,04 tahun. Sementara pada tahun 2021, target 12,25 tahun hanya tercapai sebanyak 12,05 tahun. Selain itu, rata-rata Harapan Lama Sekolah juga tidak memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, dengan target 6,94 tahun, hanya tercapai sebanyak 6,21 tahun. Kemudian, pada tahun 2021, dengan target 7,15 tahun, hanya tercapai sebanyak 6,22 tahun (Suripto, 2021).

Salah satu cara pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi guna mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan cara meningkatkan pengeluaran yang dilakukannya. Jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan maka GNP meningkat pula. Ketika pengeluaran pemerintah terlalu sedikit dapat merugikan pertumbuhan ekonomi, pemborosan terhadap pengeluaran pemerintah menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu perlunya kebijakan pengeluaran pemerintah yang proposional agar pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Semakin besar belanja pemerintah, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi melalui adanya penyediaan oleh pemerintah yang belum mampu dipenuhi oleh sektor swasta. Oleh karena itu, adanya belanja pemerintah dapat memberikan kondisi yang cukup signifikan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat (Sabilla, 2022).

Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Kenyataannya pendapatan daerah antara daerah satu dan daerah lain memiliki perbedaan yang signifikan. Sehingga melalui undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah terdapat berbagai sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pembangunan daerah. Dengan adanya pengaturan kemampuan adaptasi daerah dalam pengelolaan administrasi keuangan terjadi peningkatan pendapatan daerah. Meningkatnya pendapatan daerah maka meningkat juga anggaran belanja daerah. Peningkatan belanja daerah akan meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi selanjutnya akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat itu memberi kesejahteraan masyarakat daerah. Meningkatnya pendapatan dan belanja (APBD) harus diikuti oleh peningkatan bantuan pemerintah individu yang tercermin dalam peningkatan perkapita dan catatan kemajuan indeks pembangunan manusia (Fernandes, 2022).

Pemerintah daerah dimotivasi agar meningkatkan kemampuan, potensinya seoptimal mungkin dalam membelanjakan urusan rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Selain itu Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN, dana perimbangan juga sebagai kontribusi terbesar diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 agar pemerintahan dapat mengatur dan mengelola keuangan serta mencapai target kemandirian untuk mengelola otonom daerah. Realisasi anggaran pendapatan asli daerah yang menurun menunjukkan bahwa penyerapan anggaran pendapatan asli daerah yang rendah sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah (Rangkuty, 2022).

Pendidikan memegang peranan sentral dalam proses perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Keterbatasan dalam penyebaran pendidikan, kekurangan dalam mutu pendidikan, ketidakrelevanan pendidikan, dan ketidakefisienan serta ketidakefektifan manajemen pendidikan merupakan beberapa elemen yang dapat diidentifikasi sebagai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia (BPS Kabupaten Brebes, 2022).

Untuk mencapai pembentukan manusia berkualitas, diperlukan serangkaian usaha guna meningkatkan mutu sumber daya manusia tersebut. Pengeluaran pemerintah mencerminkan hasil dari kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah. Kebijakan alokasi anggaran merujuk pada strategi pengalokasian seluruh sumber daya dan dana yang dimiliki oleh suatu daerah untuk memperbaiki aspek-aspek pelayanan publik, dengan tujuan mencapai kesejahteraan sosial masyarakat. Riset empiris menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pertanian, belanja langsung pemerintah, investasi swasta, dan tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Si'lang, 2019).

Struktur alokasi program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang peran sentral dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Penentuan alokasi anggaran yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan akan merangsang pertumbuhan positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penyusunan APBD, sebagai suatu proses administratif, tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik di tingkat daerah, yang melibatkan interaksi antara pihak eksekutif dan legislatif. Adanya perang tarik kepentingan terkait alokasi anggaran berpotensi mengakibatkan struktur APBD yang mungkin tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat (Zebua, 2014).

PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang diperoleh daerah untuk memenuhi segala pengeluaran dalam bentuk belanja daerah. PAD berasal dari pajak daerah yang dibayar oleh wajib pajak di daerah tersebut, retribusi daerah, BUMD, dan pendapatan lain yang disahkan. Strategi suatu daerah dalam menyajikan rancangan dana yang bersumber dari daerah sangat tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam mengelola segala peluang ekonomi daerah tersebut menjadi suatu tindakan ekonomi yang bisa memberikan perputaran dana bagi kesinambungan pembangunan yang ada di daerah. Pembangunan daerah yang dilakukan secara otonom harus disertai dengan penguatan penerimaan fiskal daerah sebagai landasan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini menuntut setiap daerah agar dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah harus dapat semaksimal mungkin dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai belanja daerah yang langsung berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan umum. Belanja daerah merupakan bagian utama dalam APBD yang berkaitan dengan peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Imanulloh, 2017).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat

investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas layanan publik, pemerintah daerah hendaknya mampu mengubah proporsi belanja yang dialokasikan untuk tujuan dan hal-hal yang positif, seperti melakukan aktivitas pembangunan yang berkaitan dengan program-program untuk kepentingan publik (Raviyanti, 2017).

Alokasi dana daerah diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; namun, dalam proses penyusunannya, sering kali terjadi intervensi kepentingan politik antara pihak eksekutif dan legislatif, mengakibatkan kurang efektifnya penggunaan dana pada sektor modal. Belakangan ini, terdapat penurunan alokasi dana untuk pembangunan daerah, sementara proporsi belanja untuk pegawai mengalami peningkatan, meskipun tidak memberikan dampak langsung pada pembangunan daerah. Hal tersebut mencerminkan ketidakefektifan dalam pengalokasian dana daerah (Williantara, 2016).

Menurut perundang-undangan, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan Pemerintahan Daerah melibatkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pendapatan Yang Sah Lainnya. Pendapatan Asli Daerah merujuk pada sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan berbagai sumber pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada daerah dalam menghasilkan dana secara mandiri untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari prinsip desentralisasi.

Penerapan desentralisasi fiskal menimbulkan implikasi tertentu, di mana daerah diharapkan mampu mendanai pengeluarannya sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah. Namun, tidak semua daerah memiliki kapasitas finansial untuk melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga terjadi disparitas pembangunan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat

mengalokasikan Dana Perimbangan, yang secara langsung terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam konteks otonomi daerah atau desentralisasi (P. Lestari, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan dengan tujuan untuk meratakan kemampuan keuangan antar-daerah, guna mendukung pembiayaan kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. Penetapan alokasi DAU suatu daerah didasarkan pada kriteria celah fiskal, yang mengacu pada perbedaan antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Adapun proporsi pembagian DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan pertimbangan tertentu. Kebutuhan fiskal daerah mencakup aspek pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Sementara itu, kapasitas fiskal daerah merujuk pada sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Total alokasi DAU ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menjalankan fungsi pemerintahan yang diemban secara langsung oleh suatu daerah, esensial untuk bergantung pada pendapatan yang berasal dari wilayah tersebut sendiri. Sejalan dengan meningkatnya jumlah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah, kemampuannya untuk memenuhi serta mendanai kebutuhan yang diharapkan oleh masyarakat juga bertambah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki potensi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), asalkan proses pengalokasian dana tersebut dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Putra, 2015).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pendapatan

Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kabupaten Brebes”.

B. Perumusan Masalah

a. Identifikasi Masalah

1. Masih rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) Kabupaten Brebes tahun 2018-2022.
2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Brebes.
3. Masih rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Brebes
4. Masih kurangnya fasilitas pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Brebes
5. Masih rendahnya pendapatan Kabupaten Brebes dalam Dana Alokasi Umum (DAU)

Tabel 1.1
Data PAD dan DAK Kabupaten Brebes

No	Indikator	2020	2021	2022
1	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	32.693.080.650.000	33.533.328.430.000	35.414.759.350.000
2	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	5.566.211.568.000	6.572.615.287.676	6.561.818.951.158

b. Pembatasan Masalah

Batasan masalah diadakan untuk mencegah penyimpangan dan permasalahan pokok, agar penelitian ini terarah dan memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan penelitian sehingga penelitian sesuai dengan tujuannya. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Brebes
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Brebes
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Brebes

c. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Brebes?
3. Bagaimana pengaruh pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Brebes?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan domestik regional bruto (PDRB) terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Brebes.
2. Untuk mengetahui pengaruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Brebes.
3. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap indeks pembangunan manusia pada Kabupaten Brebes.

b. Kegunaan Penelitian

Hasil dalam penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan dan juga dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis maupun non akademis.
 - b) Sebagai masukan dan inspirasi bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

a) Peneliti

Manfaat praktis bagi peneliti adalah dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran bagaimana pengaruh pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap indeks pembangunan manusia.

b) Pembaca

Manfaat praktis bagi pembaca sebagai sarana informasi untuk menambah pengetahuan khususnya mengenai pengaruh pendapatan domestik regional bruto (PDRB) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) terhadap indeks pembangunan manusia.

c) Akademis

Manfaat praktis bagi akademis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian di masa mendatang.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PEMIKIRAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tentang metode penelitian meliputi jenis dan lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, operasional variabel penelitian dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis hasil pengolahan data untuk memecahkan masalah penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN

Kesimpulan dan saran yang disajikan dalam bab ini mengandung inti dari temuan penelitian dan saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.

